

## RINGKASAN

Upaya pemenuhan hak kelompok difabel oleh Pemerintah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang melalui program rehabilitasi sosial menjadi penting dan menarik untuk dikaji, karena dalam menjalankan program tersebut dapat menunjukkan adanya perbedaan responsivitas yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan bagaimana Pemerintah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dalam memenuhi kesejahteraan kelompok difabel, khususnya dalam hal faktor pendorong perbedaan responsivitas serta implikasinya dalam menjalankan program rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Magelang dan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Magelang. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan metode *Case Cross Comparasion*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor pendorong perbedaan responsivitas dari pemerintah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang terlihat dari aspek pengasuhan, serta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada kelompok difabel. Selain itu, adanya implikasi tersebut dapat dilihat pada keaktifan kelompok difabel dari adanya responsivitas yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Implikasi lainnya terlihat dari adanya perbedaan pelayanan yang membuat berbedanya beban yang dimiliki oleh Relawan Atensi di kedua wilayah. Berdasarkan faktor-faktor dan implikasi tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang lebih responsif dibandingkan dengan Pemerintah Kota Magelang.

**Kata Kunci:** politik kesejahteraan, kebijakan sosial, responsivitas, hak difabel, rehabilitasi sosial

## ***SUMMARY***

Efforts to fulfill the rights of disabled groups by the Government of Magelang City and Magelang Regency through social rehabilitation programs are important and interesting to study, because in carrying out these programs it can show that there are differences in the responsiveness given. This study aims to compare how the Municipal Government of Magelang and Magelang Regency fulfill the welfare of disabled groups, especially in terms of the driving factors of differences in responsiveness and their implications in carrying out social rehabilitation programs owned by the Social Service Office of Magelang City and the PPKBPPPA Office of Magelang Regency. This study uses qualitative methods and methods *Case Cross Comparasion*. The approach used is a case study approach, while the data collection techniques used are interviews and observation. The results of the study indicate that there are factors driving differences in responsiveness of the Magelang City and Magelang Regency governments, seen from the parenting aspect, as well as physical, mental, spiritual, and social guidance to groups with disabilities. Apart from that, these implications can be seen in the activeness of the disabled group from the responsiveness that has been given by the Government of Magelang Regency. Another implication can be seen from the difference in service that makes the burden of the Volunteers of Attention different in the two regions. Based on these factors and implications, it shows that the Magelang Regency Government is more responsive than the Magelang City Government.

***Keywords:*** *welfare politics, social policy, responsiveness, disability rights, social rehabilitation*